

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan paradigma baru pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, semakin memperjelas posisi dan peran Aparat Pemerintah sebagai fasilitator dalam rangka mendorong dan meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan peran Aparat Pemerintah, Perangkat Daerah dengan fungsi yang optimal sangat diperlukan dalam rangka memberikan pelayanan prima dengan tingkat pencapaian kinerja berdasarkan indikator yang ditetapkan. Indikator tersebut berkaitan dengan standar tingkat keberhasilan program dan kegiatan selama satu Tahun Anggaran (2017).

B. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

- a) Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :
Membantu Bupati dalam Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pelaksanaan kesekretariatan Dinas.
- b) Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :
 - 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- 3) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 5) Pembinaan, Pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

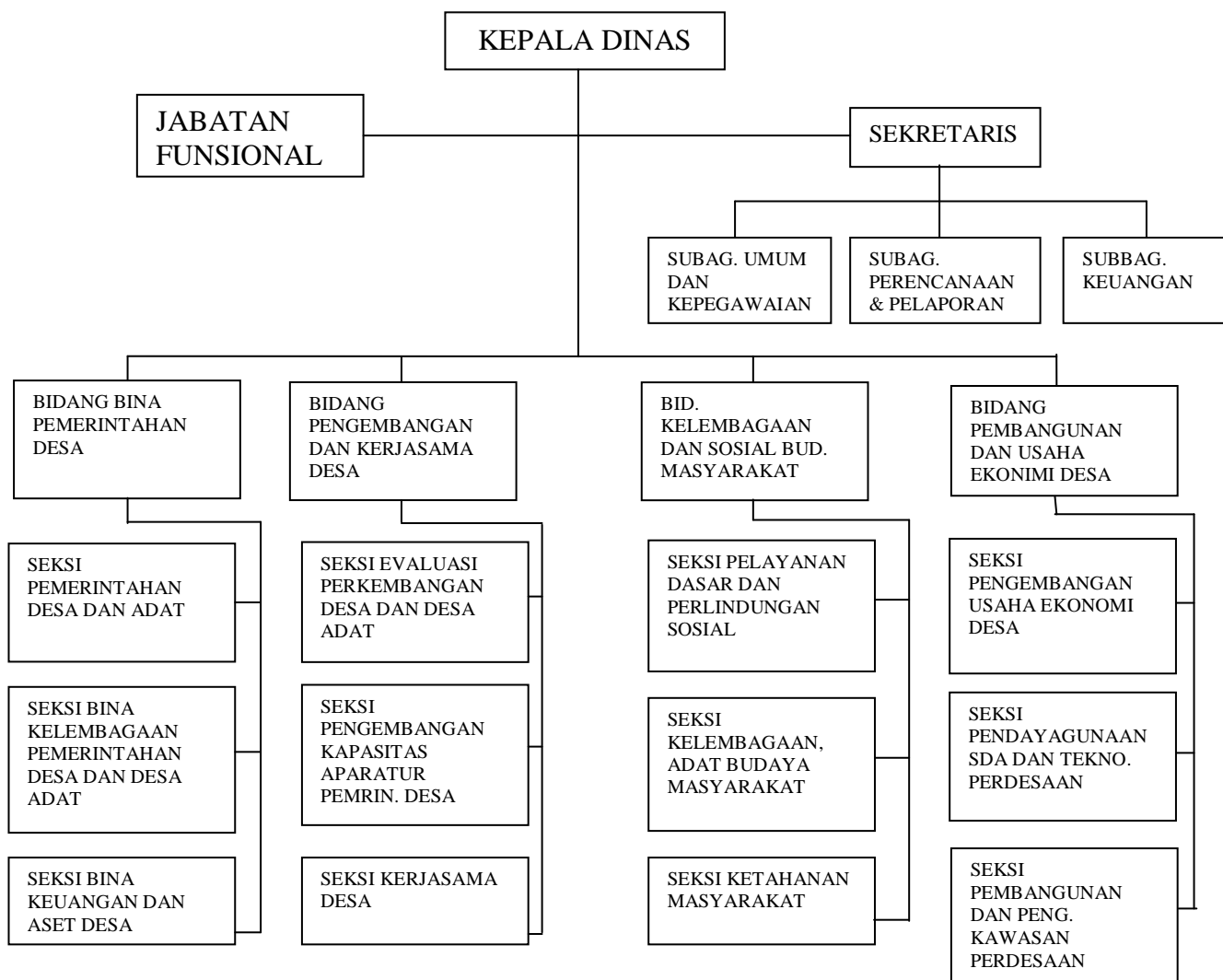
2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terdiri dari :

- a) Kepala Dinas
- b) Sekertariat
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - 3) Sub Bagian Keuangan
- c) Jabatan Fungsional
- d) Bidang Bina Pemerintahan Desa
 - 1) Seksi Pemerintahan Desa dan Desa Adat
 - 2) Seksi Bina Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Desa Adat
 - 3) Seksi Bina Keuangan Dan Aset Desa
- d) Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa
 - 1) Seksi Evaluasi Perkembangan Desa dan Desa Adat
 - 2) Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
 - 3) Seksi Kerjasama Desa
- e) Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat

- 1) Seksi Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial
- 2) Seksi Kelembagaan, Adat Budaya Masyarakat
- 3) Seksi Ketahanan Masyarakat
- f) Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa
 - 1) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
 - 2) Seksi Pendayagunaan SDA dan Teknologi Perdesaan.
 - 3) Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



C. Analisa Perkembangan Strategi

Analisa strategik yang berpengaruh terhadap perkembangan organisasi Dinas PMD Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan kondisi saat ini dan mengkaji kondisi yang diharapkan.

1. Kondisi Saat Ini

a) Faktor Internal

Faktor Internal yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan dalam pelayanan kepada masyarakat antara lain:

1) Sarana dan prasarana terdiri dari:

- ~ Gedung Kantor (Kantor Gabungan Dinas Lantai II)
- ~ Kendaraan roda empat 1 unit
- ~ Kendaraan roda dua 11 unit
- ~ Printer 10 unit
- ~ Laptop 8 buah
- ~ Note Book 3 Buah
- ~ Kamera 2 Buah
- ~ In Fokus /Proyektor 2 buah
- ~ Komputer PC 9 Unit
- ~ Filling Kabinet 5 Unit
- ~ Lemari Arsip 25 Unit
- ~ Kursi Kerja 2 unit
- ~ Kursi Rapat 117 unit
- ~ Kursi Tamu 2 Unit
- ~ Kursi Putar 12 unit

- ~ Meja Kerja 29 unit
- ~ Meja Rapat 2 unit
- ~ Hardisc Internal 1 unit
- ~ Bank Kas 1 unit
- ~ Wairless 1 Unit
- ~ AC 6 Unit
- ~ Televisi 2 Unit
- ~ Kulkas 1 Unit

2) Sumber Daya Manusia/kondisi Pegawai terdiri dari:

Keadaan Pegawai Organik dan Tenaga Sukarela Dinas PMD Kabupaten Luwu Utara terdiri dari :

i. Pegawai Organik

- a. Pembina Utama
Muda - IV/c : 1 (Satu) Orang
- b. Pembina Tk. I - IV/b : 1 (Satu) Orang
- c. Pembina - IV/a : 2 (Dua) Orang
- d. Penata Tk.I-III/ d : 7 (Tujuh) Orang
- e. Penata - III/c : 11 (Sebelas) Orang
- e. Penata Muda Tk. I-III/b : 6 (Enam) Orang
- f. Penata Muda - III/a : 7 (Tujuh) Orang
- g. Pengatur Tk. I - II/d : 2 (Dua) Orang
- h. Pengatur - II/c : 1 (Satu) Orang
- i. Pengatur Muda Tk.I-II/b : 2 (Tiga) Orang
- j. Pengatur Muda - II/a : 3 (Tiga) Orang

ii. Tenaga Sukarela

Tenaga Sukarela sebanyak 18 orang terdiri dari :

- a. Sarjana (S1) : 11 (sebelas) orang

b. SMU / Sederajat : 7 (Tujuh) orang

a) Kendala Internal

- ~ Terbatasnya dukungan sarana dan prasarana serta rendahnya kualitas SDM Aparatur.
- ~ Terbatasnya pembiayaan untuk membiayai program peningkatan kualitas SDM Aparatur.

b) Faktor Eksternal

Faktor Eksternal yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas PMD Kabupaten Luwu Utara dalam peningkatan kemampuan, kapasitas dan kemandirian masyarakat dengan berpedoman pada kebijakan-kebijakan berikut:

- ~ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- ~ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- ~ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, tentang Desa,
- ~ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
- ~ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111- 114 Tahun 2014, tentang Desa,
- ~ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82-tentang Pilkades, Nomor 83 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Nomor 84 Tahun 2014, tentang Keuangan Desa,
- ~ Peraturan Menteri Desa dan PDT Republik Indonesia Nomor 1-2-3-4-5 tentang Pemerintahan Desa.

- ~ Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008, tanggal 22 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lain Kabupaten Luwu Utara.
 - ~ Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pemilihan Kepala Desa,
 - ~ Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015, tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - ~ Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015, tentang Penataan Desa.
- c) Kendala eksternal yang dirasakan antara lain;
- ~ Masih kurangnya koordinasi Instansi yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat kepada Dinas PMD sebagai *leading sector* pemberdayaan masyarakat.
 - ~ Masih terjadi tumpang tindih program/kegiatan dengan instansi lain dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat

2. Kondisi Yang Diharapkan

Mewujudkan visi dan misi Dinas PMD Kabupaten Luwu Utara, untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat diharapkan dapat ditunjang faktor-faktor yang mendukung sebagai berikut:

a) Faktor Internal

- ~ Terisinya jabatan struktural berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lain Kabupaten Luwu Utara.

- ~ Tersedianya dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta meningkatnya kualitas, kesejahteraan dan profesionalisme SDM Aparatur.
 - ~ Pembiayaan program/kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat diharapkan dukungan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan Dinas PMD Kabupaten Luwu Utara.
- b) Faktor Eksternal
- ~ Sinergitas peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat.
 - ~ koordinasi dengan Dinas PMD sebagai *leading sector* pemberdayaan masyarakat dengan Unit Kerja yang mengelola Program Pemberdayaan.
 - ~ Program/kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh SKPD/Unit Kerja terkait diharapkan tidak terjadi adanya tumpang tindih.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan masyarakat baik lokal maupun nasional dan juga dipahami bahwa rencana strategi adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL 2010	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE
				2016	2017	2018	2019	2020	
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Berorientasi pada Publik	Laporan Keuangan Tepat Waktu Sesuai SAP	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
2	Terwujudnya Laporan Kinerja administrasi Pemerintahan yang Transparan dan dapat diakses oleh Publik	Status Laporan Kinerja Baik	D	D	C	B	A	A	A
3	Berkembangnya Organisasi dan Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Organisasi Masyarakat	7 Organisasi	8 Organisasi	8 Organisasi	8 Organisasi	8 Organisasi	8 Organisasi	8 Organisasi
4	Berkembangnya Solidaritas, Kerjasama dan Kemitraan antar Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok binaan Pemberdayaan Masyarakat	1000 Klp	1200 Klp	1500 Klp	1971 Klp	2000 Klp	2500 Klp	2500 Klp
5	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang ikut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan	7 Klp	8 Klp	8 Klp	8 Klp	9 Klp	9 Klp	9 Klp
6	Meningkatnya kualitas Pelayanan Aparat BPMPD	Persentase Kualitas SDM Aparat	Belum Survei	Belum Survei	Belum Survei	Belum Survei	50%	80%	80%

		BPMPDK							
7	Meningkatnya Kualitas SDM Aparat Badan PMPD	Jumlah Aparat Yang Telah Mengikuti Bimtek Pemberdayaan Masyarakat	1 Orang	2 Orang	2 Orang	5 Orang	8 Orang	10 Orang	10 Orang
8	Meningkatnya kualitas pelayanan aparat desa dan kelurahan	Angka Rata-Rata Aparatur Pemerintahan Desa Dengan Pendidikan S1 Per Desa	35%	48%	58%	72%	80%	88%	88%
9	Meningkatnya jumlah aparat desa yang memiliki skill/ kemampuan mengoperasikan computer	Jumlah aparat desa yang memiliki skill/ kemampuan mengoperasikan komputer.	20 Orang	30 Orang	30 Orang	46 Orang	60 Orang	85 Orang	85 Orang
10	Meningkatnya Efektifitas fungsi dan peran LKMD	Persentase fasilitasi tugas dan fungsi LKMD	5%	21%	37%	53%	60%	70%	70%
11	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan melalui wadah LKMD	Jumlah usulan kegiatan Pembangunan dari Masyarakat	80 Usulan	85 Usulan	88 Usulan	93 Usulan	102 Usulan	110 Usulan	110 Usulan
12	Meningkatnya fungsi BPD sesuai dengan PP 72 Tahun 2005 dan Perda Nomor 08 Tahun 2007	Jumlah Kepala desa, bendahara dan BPD yang dilatih Manajemen Pemerintahan Desa dan Keuangan	50 Kepala Desa	55 Kepala Desa, 30 Bendahara %	60 Kepala Desa, 30 Bendahara	60 Bendahara	40 Bendahara, 45 Kepala Desa	40 Bendahara	230 Bendahara, 150 Kepala Desa
13	Teridentifikasinya penurunan prosentase jumlah keluarga miskin	Jumlah penurunan jumlah keluarga miskin	46.800 Jiwa	42.620 Jiwa	44.100 Jiwa	38.350 Jiwa	33.250 Jiwa	25.150 Jiwa	25.150 Jiwa

14	Meningkatnya jumlah keluarga yang dapat mengembangk-an usaha / industri Rumah tangga	Jumlah keluarga yang mengemban gk-an usaha / industri Rumah tangga	25 Orang	25 Orang	30 Orang	25 Orang	35 Oran g	35 Orang	160 Orang
15	Meningkatnya jumlah desa dan kelurahan yang memiliki data potensi yang akurat	Jumlah desa yang memiliki data potensi	0	6 Desa	6 Desa	30 Desa	50 Desa	150 Desa	150 Desa
16	Tersusunnya Rencana Pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Desa) berdasarkan data potensi yang akurat	Jumlah desa yang telah menyusun RPJM-Desa Berdasarkan data Potensi yang Akurat	100 Desa	166 Desa	166 Desa	166 Desa	166 Desa	166 Desa	166 Desa
17	Meningkatnya jumlah desa dan kelurahan yang mencapai tingkat perkembangan Swadaya, Swakarsa dan Swasembada.	jumlah desa dan kelurahan yang mencapai tingkat perkembang an Swadaya, Swakarsa dan Swadaya	0	6 Desa	8 Desa	30 Desa	50 Desa	100 Desa	100 Desa

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja diharapkan dapat mengetahui tingkat kinerja organisasi pemerintah dalam periode tertentu melalui evaluasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dengan menetapkan dua indikator kinerja yaitu input dan output.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja melalui program dan kegiatan Dinas PMD Kabupaten Luwu Utara dapat disimpulkan sebagai berikut ini:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2017	CAPAIAN 2017
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Berorientasi pada Publik	Laporan Keuangan Tepat Waktu Sesuai SAP	Tepat/Tidak	Tepat	Tepat
2	Terwujudnya Laporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Yang Transparan Dan Dapat Diakses Oleh Publik	Status Laporan Kinerja Baik	A,B,C,D,E	C	C
3	Berkembangnya Organisasi dan Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Organisasi Masyarakat	Organisasi	8	7
4	Berkembangnya Solidaritas, Kerjasama dan Kemitraan antar Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Binaan Pemberdayaan Masyarakat	KLP	1500	1503

5	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Ikut Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan	KLP	8	8
6	Meningkatnya kualitas Pelayanan Aparat BPMPD	Tingkat Kepuasan Aparat Desa Terhadap Pelayanan BPMPD	100%	81%	Belum Survei
7	Meningkatnya Kualitas SDM Aparat Dinas PMD	Jumlah Aparat Yang Telah Mengikuti Bimtek Pemberdayaan Masyarakat	Orang	2	14
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparat Desa Dan Kelurahan	Angka rata-rata Aparatur Pemerintahan Desa dengan Pendidikan S1 per Desa	%	58%	40%
9	Meningkatnya Jumlah Aparat Desa Yang Memiliki Skill/ Kemampuan Mengoperasikan Computer	Jumlah Aparat Desa Yang Memiliki Skill/ Kemampuan Mengoperasikan Komputer.	Orang	30	166
10	Meningkatnya Efektifitas Fungsi Dan Peran LKMD	Persentase Fasilitasi Tugas Dan Fungsi LKMD	%	37%	45%
11	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pembangunan Dan Kemasyarakatan Melalui Wadah LKMD	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Dari Masyarakat	Usulan	88	166
12	Meningkatnya Fungsi BPD Sesuai Dengan PP 72 Tahun 2005 Dan Perda Nomor 08 Tahun 2007	Jumlah Kepala Desa, Bendahara Dan BPD Yang Dilatih Manajemen Pemerintahan Desa Dan Keuangan	Orang	60 & 30	166 Kades, 166 Sekdes & 166 Bend

13	Teridentifikasinya Penurunan Prosentase Jumlah Keluarga Miskin	Persentase Jumlah Penurunan Jumlah Keluarga Miskin	Jiwa	44.100	43.220
14	Meningkatnya Jumlah Keluarga Yang Dapat Mengembangkan Usaha / Industri Rumah Tangga	Jumlah Keluarga Yang Mengembangkan Usaha / Industri Rumah Tangga	Orang	30	Belum Survei
15	Meningkatnya Jumlah Desa Dan Kelurahan Yang Memiliki Data Potensi Yang Akurat	Jumlah Desa Yang Memiliki Data Potensi	Desa	6	93
16	Tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Berdasarkan Data Potensi Yang Akurat	Jumlah Desa Yang Telah Menyusun RPJM-Desa Berdasarkan Data Potensi Yang Akurat	Desa	166	166

Dari Tabel Sasaran dan Indikator Dinas PMD Berdasarkan Urusan Wajib terdapat 16 sasaran dan 17 Indikator Sasaran yang Mengacu pada Indikator Berdasarkan Fungsi Pelayanan DPMD dan Renstra Tahun 2016 Sampai Tahun 2021.

1. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi publik dimana proses laporan keuangan sudah sesuai dengan SAP, target dan capaian kinerja 2017 telah dilaksanakan dengan tepat.
2. Terwujudnya Laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan dan dapat diakses oleh publik dengan status laporan kinerja kategori BAIK dimana target dan capaian kinerja berpredikat A.

3. Sasaran Strategis Berkembangnya Organisasi dan Kelembagaan Masyarakat dengan Indikator Yaitu Jumlah Organisasi Masyarakat Pada Tahun 2017 Target 8 Organisasi dengan Capaian 8 Organisasi.
4. Sasaran Strategis Perkembangan Solidaritas, Kerjasama dan Kemitraan Antar Kelompok Masyarakat dengan Indikator Kinerja Jumlah Kelompok Binaan Tahun 2017 Target 1500 Kelompok dengan Capaian 1503 Kelompok.
5. Sasaran Strategis Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dengan Indikator Jumlah Kelompok Masyarakat yang Ikut dalam Musrembang Perencanaan Pembangunan Pada Tahun 2017 Target 9 Kelompok dengan Capaian 9 Kelompok.
6. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparat Dinas PMD dengan Indikator Tingkat Kepuasan Aparat Desa terhadap Pelayanan DPMD Tahun 2017 Target 81 dan Capaian Belum disurvei.
7. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas SDM Aparat Dinas PMD dengan Indikator Jumlah Aparat yang Telah Mengikuti Bimtek Tahun 2017 Target 2 orang dengan Capaian 14 Orang.
8. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Angka Rata - Rata Aparatur Pemerintahan Desa dengan Kualifikasi Pendidikan S.I.
9. Sasaran Strategis Meningkatnya Jumlah Aparat Desa yang Memiliki Skill/ Kemampuan Mengoperasikan Komputer dengan Indikator Jumlah Aparat Desa yang Memiliki Skill/ Kemampuan Mengoperasikan Komputer Tahun 2017, Target 30 Orang dengan Capaian 166 Orang.
10. Sasaran Strategis Meningkatnya Efektifitas Fungsi dan Peran LKMD dengan Indikator Persentase Fasilitasi Tugas dan Fungsi LKMD Tahun 2017 yakni 100% dengan Capaian 100%.

11. Sasaran Strategis Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan dan Kemasyarakatan Melalui Wadah LKMD dengan Indikator Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan dari Masyarakat Pada Tahun 2017 Yakni 88 Usulan dengan Capaian 166 Usulan.
12. Sasaran Strategis Meningkatnya Fungsi BPD Sesuai dengan PP 72 Tahun 2005 dan Perda Nomor 08 Tahun 2007 dengan Indikator Jumlah Kepala Desa, Bendahara dan BPD yang dilatih Manajemen Pemerintahan Desa dan Keuangan Pada Tahun 2015 Target 60 Kepala Desa, 30 Bendahara dengan Capaian 60 Kepala Desa dn 30 Bendahara.
13. Sasaran Strategis Teridentifikasinya Penurunan Prosentase jumlah Keluarga Miskin dengan Indikator Jumlah Penurunan Keluarga Miskin Pada Tahun 2015 yakni 25.150 Jiwa.
14. Sasaran Strategis Meningkatnya Jumlah Keluarga yang dapat Mengembangkan Usaha / Industri Rumah Tangga dengan Indikator Jumlah Keluarga yang Mengembangkan Usaha / Industri Rumah Tangga Pada Tahun 2015 yaitu 33 Orang dengan Capaian 160 Orang.
15. Sasaran Strategis Meningkatnya Jumlah Desa dan kelurahan yang memiliki data Potensi Desa yang Akurat dengan Indikator Jumlah Desa yang Memiliki Data Potensi Pada Tahun 2015 Target 150 desa dengan Capaian 150 Desa.
16. Sasaran strategis Tersusunya Rencana Pembangunan Desa (RPJM-Desa) berdasarkan Data Potensi yang Akurat dengan Indikator Jumlah Desa yang telah Menyusun RPJMD – Desa Berdasarkan data Potensi Desa Pada Tahun 2017 Target 166 Desa dengan Capaian 166 Desa.
17. Sasaran Strategis Meningkatnya Jumlah Desa dan Kelurahan yang Mencapai Tingkat Perkembangan Swadaya , Swakarsa dan Swadaya dengan Indikator Jumlah Desa dan Kelurahan yang mencapai tingkat

Perkembangan Swadaya, Swakarsa dan Swasembada Pada Tahun 2017
Target 100 Desa Swadaya dengan Capaian 100 Desa Swadaya.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Tabel. 1

Sasaran 1		Satuan	Target		Realisasi		Capaian %	
Uraian	Indikator		2016	2017	2016	2017	2016	2017
Berkembangnya Organisasi dan Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Organisasi Masyarakat	Organisasi	8	8	8	8	100	100

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada tahun ini dengan tahun lalu tersebut diatas dimana jumlah organisasi masyarakat yang terdaftar pada tahun lalu dibandingkan dengan tahun sekarang dimana Sasaran Strategis Berkembangnya Organisasi dan Kelembagaan Masyarakat dengan Indikator Yaitu Jumlah Organisasi Masyarakat Pada Tahun 2017 Target 8 Organisasi dengan Capaian 8 Organisasi.

Tabel. 2

Sasaran 2		Satuan	Target		Realisasi		Capaian %	
Uraian	Indikator		2016	2017	2016	2017	2016	2017
Berkembangnya Solidaritas, Kerjasama dan Kemitraan antar Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok binaan Pemberdayaan Masyarakat	KLP	1200	1500	1200	1503	100	100

Sasaran Strategis Perkembangan Solidaritas, Kerjasama dan Kemitraan Antar Kelompok Masyarakat dengan Indikator Kinerja

Jumlah Kelompok Binaan Tahun 2017 Target 1500 Kelompok dengan Capaian 1503 Kelompok.

Tabel. 3

Sasaran 3		Satuan	Target		Realisasi		Capaian %	
Uraian	Indikator		2016	2017	2016	2017	2016	2017
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang ikut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan	KLP	9	9	9	9	100	100

Pada Indikator Kinerja ke 3 (tiga) Sasaran strategis Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dengan Indikator Jumlah Kelompok Masyarakat yang Ikut dalam Musrembang Perencanaan Pembangunan Pada Tahun 2017 Target 9 Kelompok dengan Capaian 9 Kelompok.

Tabel. 4

Sasaran 4		Satuan	Target		Realisasi		Capaian %	
Uraian	Indikator		2016	2017	2016	2017	2016	2017
Meningkatnya kualitas Pelayanan Aparat Pemerintahan	Persentase Kualitas SDM Aparat DPMD	Persentase	81	81	Belum Survei	Belum Survei	100	100

Indikator Kinerja ke 4 (empat) dengan Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparat Dinas PMD dengan Indikator Tingkat Kepuasan Aparat Desa terhadap Pelayanan DPMD Tahun 2017 Target 81% dengan capaian 81%.

Tabel. 5

Sasaran 5		Satuan	Target		Realisasi		Capaian %	
Uraian	Indikator		2016	2017	2016	2017	2016	2017
Meningkatnya Kualitas SDM Aparat Badan PMPD	Jumlah Aparat yang telah mengikuti Bimtek Pemberdayaan Masyarakat	PNS	2	2	2	14	100	100

Pada Indikator ke 5 (lima) Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Aparat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Angka Rata - Rata Aparatur Pemerintahan Desa dengan Kualifikasi Pendidikan S.1.

Tabel. 6

Sasaran 6		Satuan	Target		Realisasi		Capaian %	
Uraian	Indikator		2016	2017	2016	2017	2016	2017
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pelayanan Aparat Desa/Kelurahan	Persentase	48%	58%	50%	40%	100	100-

Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Aparat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Angka Rata - Rata Aparatur Pemerintahan Desa dengan Kualifikasi Pendidikan S.1.

Tabel. 7

Sasaran 7		Satuan	Target		Realisasi		Capaian %	
Uraian	Indikator		2016	2017	2016	2017	2016	2017
Meningkatnya jumlah aparat desa yang memiliki skill/kemampuan	Persentase Aparat Desa Yang Memiliki Skill/Kemampuan Pengoperasian	Orang	30	30	28	166	100	100

mengoperasik- an computer	Komputer							
------------------------------	----------	--	--	--	--	--	--	--

Sasaran Strategis Meningkatnya Jumlah Aparat Desa yang Memiliki Skill/ Kemampuan Mengoperasikan Komputer dengan Indikator Jumlah Aparat Desa yang Memiliki Skill/ Kemampuan Mengoperasikan Komputer Tahun 2017, Target 30 Orang dengan Capaian 166 Orang.

Tabel. 8

Sasaran 8		Satuan	Target		Realisasi		Capaian %	
Uraian	Indikator		2016	2017	2016	2017	2016	2017
Meningkatnya Efektifitas fungsi dan peran LKMD	Persentase Fasilitasi Tugas Dan Fungsi LKMD	Persentase	21	37	21	45	100	100

Indikator sasaran ke 6 (enam) Sasaran Strategis Meningkatnya Efektifitas Fungsi dan Peran LKMD dengan Indikator Persentase Fasilitasi Tugas dan Fungsi LKMD Tahun 2017 yakni 100% dengan Capaian 100%.

Tabel. 9

Sasaran 9		Satuan	Target		Realisasi		Capaian %	
Uraian	Indikator		2016	2017	2016	2017	2016	2017
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pembangunan Dan Kemasyarakatan Melalui Wadah LKMD	Jumlah Masyarakat Yang Aktif Dalam Kegiatan Gotong Royong Melalui LKMD	Usulan	85	88	85	166	100	100

Sasaran Strategis Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan dan Kemasyarakatan Melalui Wadah

LKMD dengan Indikator Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan dari Masyarakat Pada Tahun 2017 Yakni 88 Usulan dengan Capaian 166 Usulan.

Tabel. 10

Sasaran 10		Satuan	Target		Realisasi		Capaian %	
Uraian	Indikator		2016	2017	2016	2017	2016	2017
Meningkatnya fungsi BPD sesuai dengan PP 72 Tahun 2005 dan Perda Nomor 08 Tahun 2007	Jumlah Kepala desa, bendahara dan BPD yang telah terlatih	Kepala Desa & Bendahara	50 & 30	60 & 30	55 & 30	166 Kades, 166 Sekdes & 166 Bend	100	100

Sedangkan sasaran Strategis Meningkatkan Fungsi BPD Sesuai dengan PP 72 Tahun 2005 dan Perda Nomor 08 Tahun 2007 dengan Indikator Jumlah Kepala Desa, Bendahara dan BPD yang dilatih Manajemen Pemerintahan Desa dan Keuangan Pada Tahun 2017 Target 60 Kepala Desa, 30 Bendahara dengan Capaian 166 Kepala Desa, 166 Sekdes, dan 166 Bendahara.

Tabel. 11

Sasaran 11		Satuan	Target		Realisasi		Capaian %	
Uraian	Indikator		2016	2017	2016	2017	2016	2017
Teridentifikasinya penurunan prosentase jumlah keluarga miskin	Jumlah penurunan jumlah keluarga miskin	Jiwa	42.620	46.100	42.620	43.220	100	100

Sasaran Strategis Teridentifikasinya Penurunan Prosentase jumlah Keluarga Miskin dengan Indikator Jumlah Penurunan Keluarga Miskin Pada Tahun 2014 yakni 44.100 Jiwa.

Tabel. 12

Sasaran 12		Satuan	Target		Realisasi		Capaian %	
Uraian	Indikator		2016	2017	2016	2017	2016	2017
Meningkatnya jumlah keluarga yang dapat mengembangkan usaha / industri Rumah tangga	Jumlah keluarga yang mengembangkan usaha / industri Rumah tangga	Orang	25	30	25	Belum Survei	200	200

Sasaran Strategis Meningkatkan Jumlah Keluarga yang dapat Mengembangkan Usaha / Industri Rumah Tangga dengan Indikator Jumlah Keluarga yang Mengembangkan Usaha / Industri Rumah Tangga Pada Tahun 2017 yaitu 30 Orang dengan Capaian 160 Orang.

Tabel. 13

Sasaran 13		Satuan	Target		Realisasi		Capaian %	
Uraian	Indikator		2016	2017	2016	2017	2016	2017
Meningkatnya jumlah desa dan kelurahan yang memiliki data potensi yang akurat	Jumlah desa yang memiliki data potensi	Desa	6	6	6	93	100	100

Sasaran Strategis Meningkatkan Jumlah Desa dan kelurahan yang memiliki data Potensi Desa yang Akurat dengan Indikator Jumlah Desa yang Memiliki Data Potensi Pada Tahun 2017 Target 6 desa dengan Capaian 93 Desa.

Tabel. 14

Sasaran 14		Satuan	Target		Realisasi		Capaian %	
Uraian	Indikator		2016	2017	2016	2017	2016	2017
Tersusunnya Rencana Pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Desa) berdasarkan data potensi yang akurat	Jumlah desa yang telah menyusun RPJM-Desa Berdasarkan data Potensi yang Akurat	Desa	166	166	166	166	100	100

Sasaran strategis Tersusunnya Rencana Pembangunan Desa (RPJM-Desa) berdasarkan Data Potensi yang Akurat dengan Indikator Jumlah Desa yang telah Menyusun RPJMD – Desa Berdasarkan data Potensi Desa Pada Tahun 2017 Target 166 Desa dengan Capaian 166 Desa.

Tabel. 15

Sasaran 15		Satuan	Target		Realisasi		Capaian %	
Uraian	Indikator		2016	2017	2016	2017	2016	2017
Meningkatnya jumlah desa dan kelurahan yang mencapai tingkat perkembangan Swadaya, Swakarsa dan Swasembada.	jumlah desa dan kelurahan yang mencapai tingkat perkembangan Swadaya, Swakarsa dan Swadaya	Desa	100	100	100	166	100	100

Sasaran Strategis Meningkatkan Jumlah Desa dan Kelurahan yang Mencapai Tingkat Perkembangan Swadaya , Swakarsa dan Swadaya dengan Indikator Jumlah Desa dan Kelurahan yang mencapai tingkat Perkembangan Swadaya, Swakarsa dan Swasembada Pada

Tahun 2017 Target 100 Desa Swadaya dengan Capaian 100 Desa Swadaya.

3. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2016	CAPAIAN 2017
1	Laporan Keuangan Tepat Waktu Sesuai SAP	Tepat	Tepat
2	Status Laporan Kinerja Baik	A	A
3	Jumlah Organisasi Masyarakat	8 Organisasi	8 Organisasi
4	Jumlah Kelompok binaan Pemberdayaan Masyarakat	2500 Klp	2500 Klp
5	Jumlah Kelompok Masyarakat yang ikut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan	9 Klp	9 Klp
6	Tingkat Kepuasan Aparat Desa terhadap Pelayanan DPMD	80 %	80 %
7	Jumlah Aparat yang telah mengikuti Bimtek Pemberdayaan Masyarakat	10 Orang	10 orang
8	Angka rata-rata Aparatur Pemerintahan Desa dengan Pendidikan S1 per Desa	80%	80 %
9	Jumlah aparat desa yang memiliki skill/ kemampuan mengoperasikan komputer.	85 Orang	85 orang
10	Persentase fasilitasi tugas dan fungsi LKMD	70 %	70 %
11	Jumlah usulan kegiatan Pembangunan dari Masyarakat	110 Usulan	110 Usulan
12	Jumlah Kepala desa, bendahara dan BPD yang dilatih Manajemen Pemerintahan Desa dan Keuangan	40 Bendara, 40 Kepala Desa	230 Bendara, 150 Kepala Desa
13	Jumlah penurunan jumlah keluarga miskin	25.150 Jiwa	25.150 jiwa
14	Jumlah keluarga yang mengembangk-an usaha / industri Rumah tangga	33 Orang	160 Orang
15	Jumlah desa yang memiliki data potensi	150 Desa	150 Desa
16	Jumlah desa yang telah menyusun RPJM-Desa Berdasarkan data Potensi yang Akurat	166 Desa	166 Desa
17	jumlah desa dan kelurahan yang mencapai tingkat perkembangan Swadaya, Swakarsa dan	100 Desa	100 Desa

- | | | | |
|--|---------|--|--|
| | Swadaya | | |
|--|---------|--|--|
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah di lakukan.

Dinas PMD Kabupaten Luwu Utara, secara umum tetap diharapkan pada tantangan, dari aspek eksternal dan internal.

1. *Dari Aspek Eksternal*

Terbatasnya kemampuan aparat dalam menerapkan perlunya hubungan strategis. Selain itu koordinasi SKPD dalam bidang pemberdayaan belum berjalan efektif.

2. *Dari Aspek Internal.*

a. Terbatasnya dukungan SDM dalam pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya dalam pembinaan pemerintah desa/kel.

b. Terbatasnya dukungan sarana dan Prasarana utamanya Sarana Transportasi untuk mengakses luas wilayah dan daerah terpencil.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan pencapaian Pernyataan Kinerja dalam pemberdayaan masyarakat adalah:

- a) Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui intervensi berbagai program pembangunan, agar masyarakat dapat mencapai tingkat kemandirian yang di harapkan.

- b) Memberikan wewenang secara profesional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.
- c) Meningkatkan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan fasilitas pemerintah melalui 4 (empat) akses, yakni :
 - ~ Akses terhadap sumber daya;
 - ~ Akses terhadap teknologi, yakni suatu metode dan teknik pelaksanaan kegiatan dengan cara lebih baik dan lebih efisien, termasuk akses mendayagunakan prasarana dan sarana produksi, dan peningkatan keterampilan berusaha;
 - ~ Akses terhadap informasi pasar dan kemudahan pemasaran hasil usaha;
 - ~ Akses terhadap sumber pembiayaan melalui bantuan dan skim kredit untuk modal usaha ekonomi produktif.
- d) Mengembangkan kemampuan, kemandirian, dan peran aktif masyarakat melalui :
 - ~ Keberpihakan dan mendasarkan diri pada kebutuhan dasar masyarakat;
 - ~ Mengembangkan inspirasi, aspirasi, dan partisipasi masyarakat;
 - ~ Menggerakkan dan menghidupkan aktivitas ekonomi rakyat;
 - ~ Pengorganisasian dan penguatan kelembagaan masyarakat yang dikelola dan menjadi penanggung jawab masyarakat sendiri;

- ~ Bantuan, bimbingan dan pembinaan pemerintah merupakan tanggung jawab dari semua instansi melalui koordinasi dan keterpaduan;
- ~ Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan di perdesaan dan perkotaan;
- ~ Pengembangan teknologi tepat guna dengan mengutamakan jenis teknologi padat karya.

B. Realisasi Anggaran.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Luwu Utara yang membidangi pemberdayaan masyarakat dalam segala aspek pembangunan, dengan menggunakan tolok ukur keberhasilan capaian kinerja sebagaimana telah diuraikan sebelumnya (kinerja kebijaksanaan, kinerja program dan kinerja kegiatan) merupakan program/kegiatan yang tidak terlepas dari dukungan dana atau keuangan sebagai faktor yang sangat menentukan terlaksananya kegiatan.

Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 7.468.155.000.- meliputi :

- Belanja Tidak Langsung Rp. 2.673.155.000.-
- Belanja langsung Rp. 4.795.000.000.-

Belanja tidak langsung dan Belanja Langsung tersebut di atas, digunakan untuk operasionalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PMD dengan perincian sebagai berikut :

- Belanja Tidak Langsung Rp. 2.672.193.000.-
 - A. Belanja Gaji dan Tunjangan Rp. 2.281.793.000.-
 - B. Tambahan Penghasilan PNS Rp. 390.400.000.-
- Belanja langsung Rp. 4.795.000.000.-
 - 1. Belanja Pegawai Personalia Rp. 669.700.000.-
 - 2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.976.551.000.-
 - 3. Belanja Modal Rp. 148.795.000.-

Berdasarkan pertanggungjawaban keuangan posisi akhir Tahun Anggaran 2017, dapat diinformasikan sebagai berikut :

- Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung sebesar Rp. 7.468.155.000.- yang di SPM-kan/dicairkan sebesar Rp. 7.461.153.258- Meliputi :
 - Belanja Tidak Langsung Rp. 2.672.189.328.-
 - Belanja Langsung Rp. 4.788.963.930.-
- Realisasi Belanja Tidak langsung dan belanja langsung tersebut di atas sebesar Rp.7.461.153.258.- Meliputi :
 - Belanja Tidak Langsung Rp. 2.672.189.328.-
 - Belanja Langsung Rp. 4.788.963.930.-
- Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Anggaran Belanja Langsung yang tidak dapat direalisasikan/dilaksanakan sebesar Rp 7.001.742.-

Kondisi pelaksanaan anggaran tersebut di atas, dimana realisasinya tidak mencapai 100% antara lain karena faktor waktu dan kendala lain yang terkait dengan mekanisme dan teknis pelaksanaan.

Dari Total Pagu Anggaran berdasarkan DPA tersebut direalisasikan sejumlah Rp. 7.461.153.258-, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	(%)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
	Belanja Pegawai	2.673.155.000.-	2.672.189.328.-	99,9%
	BELANJA LANGSUNG			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.998.000.-	2.997.000.-	99,9%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.200.000.-	7.179.250.-	99,7%
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3.506.230.-	3.506.230.-	100%
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	9.600.000.-	9.600.000	100%
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.316.000.-	7.131.000.-	99,9%
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.840.000.-	7.840.000.-	100%
7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	225.864.470.-	225.412.650.-	99,7%
8	Penatausahaan Keuangan, Adm. Kepegawaian, Ketatausahaan dan Asset	341.410.000.-	341.330.000.-	99,9%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
9	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	34.294.000.-	34.294.000.-	100%
10	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	94.455.000.-	94.455.000.-	100%
11	Pengadaan Mebeleur	20.000.000.-	20.000.000.-	100%
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	13.235.000.-	13.221.000.-	99,8%
13	Pemeliharaan Ruti/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	15.000.000.-	14.900.000.-	99,3%
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	10.000.000.-	9.989.000.-	99,8%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
15	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	152.000.000.-	151.597.900.-	99,7%

	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
16	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.500.000.-	21.500.000.-	100%
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan			
17	Kunjungan Kerja Bersama Bupati/Wakil Bupati/DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah Tingkat Atas/Unit Kerja Terkait	35.140.000.-	35.080.000.-	99,8%
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			
18	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	300.008.500.-	299.008.500.-	99,6%
19	Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	230.459.750.-	230.378.150.-	99,9%
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan			
20	Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan menengah di Perdesaan	878.654.300.-	878.516.800.-	99,9%
21	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	349.791.000.-	349.740.200.-	99,9%
	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa			
21	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	293.763.000.-	293.762.950.-	99,9%
22	Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	53.552.500.-	53.547.500.-	99,9%
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa			
23	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	370.471.000.-	370.349.150.-	99,9%
24	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	100.530.000.-	100.496.000.-	99,9%
25	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	202.256.750.-	201.656.250.-	99,7%
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			

26	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	248.950.000.-	248.924.000.-	99,9%
27	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	96.440.000.-	95.955.000.-	99,4%
28	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	368.944.500.-	368.464.400.-	99,8%
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan			
29	Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	300.000.000.-	298.132.000.-	99,3%

BAB IV

P E N U T U P

Hasil evaluasi kinerja pada Dinas PMD Kabupaten Luwu Utara, secara umum dapat dinyatakan bahwa sudah mencapai tingkat **Sangat Berhasil** berdasarkan Skala pengukuran ordinal.

A. KESIMPULAN

Evaluasi kinerja Dinas PMD Kabupaten Luwu Utara pada Tahun Anggaran 2017, berdasarkan skala pengukuran kinerja Unit Kerja merupakan standar tolok ukur penilaian melalui analisis pencapaian hasil kinerja secara obyektif.

B. SARAN - SARAN

1. Seiring dengan perkembangan era ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi yang sarat dengan program pembangunan disegala bidang, maka dituntut ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu diharapkan disediakan fasilitas melalui pendidikan, pelatihan dan kursus-kursus penunjang kepada aparatur dalam mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat yang lebih profesional.
2. Upaya untuk mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diwarnai oleh dinamika perkembangan pembangunan yang maju dan modern, maka disarankan untuk diberi peluang kepada aparatur untuk melaksanakan study kerja sebagai bahan

komperatif pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan pembangunan yang lebih baik kedepan.

3. Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Pemerintah Kab. Luwu Utara melalui pemberdayaan masyarakat yang telah dirumuskan dan bersinergi dengan Instansi terkait, supaya direalisasikan secara optimal.
4. Program Pemberdayaan masyarakat yg dialokasikan pemerintah pusat ke Kabupaten, pada setiap unit kerja agar dikoordinasikan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selaku instansi yang membidangi pemberdayaan.

Demikian untuk dilaporkan dan sabagai bahan proses lebih lanjut.

Masamba, 26 Januari 2017

KEPALA DINAS,

Drs. MISBAH

Pkt : Pembina Tk.I

Nip : 19670405 199710 1 001